

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam penerbitan kebijakan perdagangan yang berdampak pada kerugian investasi korporasi, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintah dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2025. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian investasi yang timbul akibat kebijakan pemerintah tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, kecuali memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kewenangan yang sah dalam rangka melindungi kepentingan umum, sehingga tidak memenuhi unsur melawan hukum dan kesalahan. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat dibebani pertanggungjawaban perdata dalam bentuk ganti rugi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerugian investasi akibat kebijakan pemerintah merupakan bagian dari risiko kebijakan (policy risk) yang harus diperhitungkan oleh investor. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap investasi tidak bersifat absolut, melainkan harus diseimbangkan dengan kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum terkait perlindungan investasi dan tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan publik.

Kata kunci: perbuatan melawan hukum, kebijakan perdagangan, investasi korporasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the qualification of unlawful acts committed by the government in issuing trade policies that impact corporate investment losses, as well as to examine the forms of government legal liability and the legal considerations of the Supreme Court in Decision Number 3091 K/Pdt/2025. This research is a normative legal study using a statutory approach and a case approach. The results indicate that investment losses arising from government policies cannot automatically be classified as unlawful acts unless all elements as stipulated in Article 1365 of the Civil Code are fulfilled. In the decision, the Supreme Court held that the government's policy constituted a legitimate exercise of authority aimed at protecting public interest, and therefore did not meet the elements of unlawfulness and fault. Consequently, the government cannot be held liable under civil law in the form of compensation. The study also shows that investment losses resulting from government policies constitute a form of policy risk that must be considered by investors. Thus, legal protection for investment is not absolute but must be balanced with the government's authority in carrying out its regulatory functions. This research is expected to contribute to the development of legal scholarship concerning investment protection and government liability in public policy.

Keywords: *unlawful act, trade policy, corporate investment*